

Pengelolaan Sarana dan Prasarana dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di MAN 1 Mojokerto

Abdul Basith

Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto, Indonesia

abdulbasith1234569@gmail.com

Diserahkan tanggal 15 Oktober 2023 | Diterima tanggal 29 November 2023 | Diterbitkan tanggal 30 Desember 2023 | DOI: 10.59966/isedu.v1i2.805

Abstract

Private and public schools that receive non-physical allocation funds, such as BOS funds, have the same rights. The costs of maintaining infrastructure and facilities, including minor repairs, rehabilitation and the acquisition of equipment at affordable prices, are covered by one of the BOS funds. The problem of this study is that not all public and private educational institutions are able to supervise educational facilities and infrastructure. so many infrastructure facilities that initially only suffered minor damage were left with significant damage. By using qualitative methodology and conducted in the field. The head of madrasah, Waka curriculum, and Waka infrastructure were the subject of research studies. In some respects, it can be concluded as follows from the results of research and discussion: MA Negeri 1 Mojokerto first managed to organize infrastructure based on three indicators-needs, funding, and Priorities-found by researchers. Plan MA Negeri 1 Mojokerto strategy in improving education standards. In order to improve the quality of Education, has established procedures for maintenance, purchasing, and maintenance of infrastructure procurement in accordance with the criteria and strategic plans that have been set. The infrastructure purchased in order to improve the quality of Madrasah Aliyah Negeri 1 Mojokerto is in line with the quality, sources, and indications developed by researchers.

Kata Kunci: Infrastructure Management, Education Quality, MAN 1 Mojokerto

Abstrak

Sekolah swasta dan negeri yang menerima dana alokasi non-fisik, seperti dana BOS, memiliki hak yang sama. Biaya pemeliharaan infrastruktur dan fasilitas, termasuk perbaikan kecil, rehabilitasi, dan perolehan peralatan dengan harga terjangkau, ditanggung oleh salah satu dana BOS. Permasalahan dari penelitian ini adalah tidak semua lembaga pendidikan negeri dan swasta mampu mengatasi sarana dan prasarana pendidikan. sehingga banyak sarana prasarana yang pada awalnya hanya mengalami kerusakan ringan dibiarkan mengalami kerusakan yang berarti. Dengan Menggunakan Metodologi kualitatif dan dilakukan di lapangan. Kepala madrasah, kurikulum Waka, dan infrastruktur Waka menjadi subjek penelitian penelitian. Dalam beberapahal, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut dari hasil penelitian dan pembahasan: MA Negeri 1 Mojokerto pertama berhasil menyelenggarakan infrastruktur berdasarkan tiga indikator-kebutuhan, pendanaan, dan prioritas-yang ditemukan oleh para peneliti. Rencana MA Negeri 1 Mojokerto strategi dalam meningkatkan standar pendidikan. Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, telah menetapkan tata cara pemeliharaan, pembelian, dan pemeliharaan pengadaan infrastruktur yang sesuai dengan kriteria dan rencana strategis yang telah ditetapkan. Sarana prasarana yang dibeli dalam rangka peningkatan kualitas Madrasah Aliyah Negeri 1 Mojokerto sejalan dengan kualitas, sumber, dan indikasi yang dikembangkan oleh peneliti.

Keywords: Pengelolaan Sarana Prasarana, Mutu Pendidikan, MAN 1 Mojokerto

Copyright © 2023, Author

This is an open-access article under the [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



PENDAHULUAN

Lembaga yang dikenal sebagai sekolah atau madrasah adalah bagian dari struktur sosial negara dan bekerja untuk menciptakan individu yang cakap, demokratis, bertanggung jawab, sehat, dan di atas segalanya berpengetahuan luas. Jika tujuannya ingin dipenuhi, kurikulum yang

kuat dengan infrastruktur dan fasilitas yang memungkinkan. Instruktur akan lebih mudah menjalankan kewajibannya sebagai pendidik jika sekolah atau madrasah memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang lebih lengkap dan memadai. Agar kegiatan pembelajaran menjadi lebih bervariasi, menarik, dan signifikan, sarana dan prasarana akan mendukung guru. Akibatnya, sekolah memikul tanggung jawab untuk mengawasi, melestarikan, dan memperbaiki infrastruktur dan fasilitasnya. (Norlena, 2015)

Menurut temuan survei PISA, yang telah menjadi standar dunia untuk menilai kualitas pendidikan, sistem pendidikan Indonesia berada dalam kondisi yang kurang menjanjikan. Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) melaporkan bahwa Indonesia mendapat nilai buruk dalam survei PISA 2018, yang mengevaluasi kecakapan membaca, matematika, dan sains (Hewi & Shaleh, 2020). Menurut daftar peringkat PISA, negara ini berada di urutan terbawah. Dari 77 negara yang disurvei, Indonesia berada di urutan ke-72 untuk kecakapan membaca. Dari 78 negara yang mengikuti studi tersebut, Indonesia menempati urutan ke-72 dalam disiplin matematika. Dalam nada yang sama, Indonesia berada di urutan ke-70 dari 78 negara dalam bidang sains. Keadaan ini menunjukkan tren stasioner dalam nilai yang dicapai selama sepuluh hingga lima belas tahun sebelumnya.114-123. Pemerintah mengembangkan Standar Pendidikan Nasional (SNP) nomor 4 tahun 2022 dalam rangka tercapainya pendidikan yang berkualitas. Standar-standar tersebut antara lain: 1) Standar Kompetensi Lulusan; 2) Standar Isi; 3) Standar Proses; 4) Standar Penilaian Pendidik; 5) Standar Pendidikan; 6) Standar Infrastruktur; 7) Standar Manajemen; dan 8) Standar Pembiayaan. Tercapainya pendidikan yang berkualitas membutuhkan kepatuhan terhadap kriteria (Nicomse & Naibaho, 2022).

Lima kriteria, menurut Bafadal, menentukan apakah sebuah sekolah atau madrasah memberikan pengajaran yang berkualitas tinggi. Berikut faktor-faktor tersebut: 1) Kegiatan pengajaran dan pembelajaran 2) pengajaran yang efektif dan berhasil; 3) buku dan materi pembelajaran yang memadai dan terpelihara dengan baik; 4) sekolah yang menarik secara visual; dan 5) partisipasi aktif masyarakat atau pemangku kepentingan. Paparan Bafadal menunjukkan bahwa salah satu ukuran kualitas sekolah adalah infrastrukturnya (Pendidikan et al., 2017). Madrasah atau sekolah yang menghasilkan lulusan atau produk berkualitas tinggi dikatakan berkualitas tinggi. Setiap aspek lembaga pendidikan harus dikelola, termasuk infrastrukturnya, agar dapat menghasilkan lulusan yang kompeten. Semua barang dan peralatan yang digunakan secara langsung dan membantu dalam proses pendidikan pada dasarnya termasuk dalam fasilitas pendidikan. Di sisi lain, infrastruktur merupakan fasilitas yang membantu proses pendidikan secara tidak langsung. Upaya suportif diperlukan dalam menerapkan proses pembelajaran dan memanfaatkan sumber daya pendidikan sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan (Sumual et al., 2023).

Dibandingkan dengan sekolah swasta, sekolah negeri yang sering disebut madrasah mendapat keuntungan dari pemerintah dalam hal infrastruktur dan fasilitas. Pemerintah menyediakan semua dana, yang merupakan hak. (Ghozali et al., 2013), meskipun hal ini tidak menghalangi dukungan pemerintah terhadap sekolah swasta atau madrasah. Sekolah swasta dan negeri memiliki keistimewaan yang sama, termasuk kemampuan untuk menerima dana BOS-alokasi dana non-fisik. Biaya pemeliharaan infrastruktur dan fasilitas, termasuk perbaikan kecil, rehabilitasi, dan perolehan peralatan dengan harga terjangkau, ditanggung oleh salah satu dana BOS. Kesenjangan atau permasalahan kajian tersebut adalah tidak semua lembaga pendidikan negeri dan swasta mampu mengawasi sarana dan prasarana pendidikan. sedemikian rupa sehingga banyak fasilitas infrastruktur yang hanya mengalami kerusakan kecil pada awalnya diizinkan untuk mengalami kerusakan yang signifikan.

Menurut temuan pertama para peneliti, MA Negeri 1 Mojokerto berfokus pada peningkatan kualitas dan beroperasi berdasarkan gagasan "MA Negeri 1 Mojokerto bangkit menuju pencapaian." Peningkatan kualitas melalui infrastruktur pendidikan salah satunya. Semua infrastruktur Madrasah saat ini diinventarisasi tanpa ada satu detail pun yang terlewatkan,

menunjukkan pengelolaan sarana dan prasarana MA Negeri 1 Mojokerto yang sangat baik. Selain itu, MA Negeri 1 Mojokerto memelihara dan membeli infrastruktur dengan menggunakan prinsip efisiensi tanpa mengorbankan kegunaan atau nilainya. Seperti yang ditunjukkan oleh peningkatan prestasi akademik dan jumlah mahasiswa yang diterima di perguruan tinggi negeri, infrastruktur dan kualitas pendidikan MA Negeri 1 Mojokerto berjalan selaras sempurna. Jumlah mahasiswa yang diterima di perguruan tinggi negeri meningkat dari 121 pada tahun 2019 menjadi 144 pada tahun 2021. Dari segi prestasi akademik, MA Negeri 1 Mojokerto meraih juara tingkat nasional sebanyak 273 kali di bidang IPTEK dan IPS pada tahun 2021; pada tahun 2022, angka tersebut meningkat menjadi 310. Selain itu, pada tahun 2023, MA Negeri 1 Mojokerto muncul sebagai sekolah atau madrasah yang paling diterima di perguruan tinggi negeri daerah Jawa Timur.

METODE PENELITIAN

Alat utama dalam penelitian ini, yang mengkaji kondisi benda-benda alam dengan menggunakan metode kualitatif, adalah peneliti. Analisis data induktif / kualitatif, temuan penelitian kualitatif yang menekankan makna daripada generalisasi, dan prosedur pengumpulan data triangulasi (gabungan) semuanya digunakan. Studi semacam ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan analitik karena mengkaji dan menawarkan informasi tentang kondisi sebenarnya dari objek secara terorganisir. Penelitian MA Negeri 1 dilakukan di Mojokerto.

PEMBAHASAN

a. Pengetian Operasional

a. *Pengelolaan Sumber Daya dan Prasarana*

Dalam Kamus *Webster's Super New School and Office*, kata "manajemen" berarti "memimpin atau melanjutkan, mengarahkan." Dalam Kamus Besar Bahasa Inggris Indonesia artinya "mengurus, Mengatur, melaksanakan, mengatur" (John M. Echols, Hassan Shadily, Kamus Besar Bahasa Inggris Indonesia). Mengelola adalah "berhasil melakukan sesuatu yang sangat sulit", menurut *Oxford Advanced Learner's Dictionary*. Manajemen adalah proses mengoperasikan dan mengawasi perusahaan atau entitas lain semacam itu. Sebaliknya, manajemen digambarkan sebagai "proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan" dalam kamus besar bahasa Indonesia. (Aji, 2012)

Menurut Gareth R. Jones, manajemen adalah proses pengorganisasian, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar berhasil dan efisien mencapai tujuan organisasi. Jones dan rekan (2000): 5. Menurut Terry, "*manajemen adalah proses yang berbeda yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerak, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan yang dinyatakan dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya*". Untuk mengidentifikasi dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya, manajemen adalah serangkaian tindakan yang membagi proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pemantauan. (Setiabudi Sukma et al., 2024)

Lebih tepatnya, manajemen adalah kapasitas atau kecakapan untuk hasil yang diinginkan untuk memenuhi tujuan. Ini terdiri dari setiap kegiatan yang, dengan bantuan orang lain, mengatur sekelompok orang atau memfokuskan semua sumber daya yang tersedia dalam upaya bersama untuk mencapai suatu tujuan. (Ummah, 2019)

Semua alat, perlengkapan, bahan, dan perlengkapan yang langsung digunakan dalam pengajaran di kelas dianggap sebagai fasilitas pendidikan, menurut Bafadal. Sebaliknya, infrastruktur pendidikan mencakup semua fasilitas mendasar yang membantu sekolah menjalankan proses pendidikan secara tidak langsung. Syafaruddin berpendapat serupa, menyatakan bahwa prasarana pendidikan terdiri dari semua perlengkapan dasar yang secara tidak langsung mendukung proses pendidikan di sekolah, sedangkan sarana pendidikan

terdiri dari semua perabot, perlengkapan, dan perlengkapan yang berhubungan langsung dengan proses belajar mengajar di sekolah. (Juita et al., 2024)

Salah satu bidang studi administrasi sekolah yang juga dikenal dengan administrasi pendidikan adalah pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Kepala sekolah, sebagai pengurus sekolah, bertanggung jawab atas tanggung jawab ini. Praktik penggunaan semua peralatan pendidikan secara kolaboratif secara efektif dan efisien merupakan definisi paling sederhana dari penyelenggaraan sarana dan prasarana pendidikan. (Hasbi et al., 2021)

Pemanfaatan secara kooperatif seluruh sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien merupakan definisi pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan, menurut Bafadal. Menurut Sulistyorini, pengelolaan infrastruktur dapat dipahami untuk menggunakan semua sumber daya dan infrastruktur pendidikan secara kolaborasi. Proses kerja sama pemanfaatan seluruh sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien juga dapat dilihat sebagai pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Konsep ini menyoroti betapa pentingnya menggunakan dan memelihara infrastruktur dan fasilitas yang terdapat di perguruan tinggi untuk memfasilitasi proses pembelajaran di sana. Tujuan dari pengelolaan ini adalah untuk memastikan bahwa perguruan tinggi dapat menggunakan sarana dan prasarana seefektif dan seideal mungkin. Dalam konteks pendidikan tinggi, manajemen fasilitas dan infrastruktur sangat penting karena sangat penting untuk proses belajar yang cukup efektif.

b. Tujuan Prasaran dan Manajemen Sarana

Mustahil untuk memisahkan hasil yang diharapkan dari pengelolaan infrastruktur dan sarana pendidikan dari gagasan yang telah dibahas sebelumnya, yaitu mendorong tumbuhnya pendidikan holistik dalam upaya memenuhi tujuan pendidikan. Akan tetapi, tujuan pengelolaan sarana dan prasarana dapat dinyatakan sebagai berikut jika ditelaah secara lebih rinci.

- 1) Menawarkan dukungan yang sesuai dan menguntungkan untuk pengembangan pendidikan, karena pengelolaan infrastruktur dan sarana merupakan aspek penting dari pengelolaan pendidikan yang secara langsung mempengaruhi keberhasilan dan pencapaian tujuan pendidikan tersebut.
- 2) Mengkuantifikasi dan memahami nilai barang milik negara di bidang pendidikan dalam hal fitur berwujud, infrastruktur, dan fasilitas yang memiliki nilai uang.
- 3) Dalam suatu unit kerja dalam suatu lembaga tertentu, mengkaji dan memahami berbagai jenis, jumlah, kualitas, dan kondisi persediaan barang milik negara. Temuan-temuan tersebut kemudian memungkinkan perolehan gambaran menyeluruh tentang kekayaan negara di berbagai tingkatan, termasuk instansi, kecamatan, kabupaten, dan provinsi, yang meliputi jenis, jumlah, kualitas, dan kondisinya.
- 4) Memastikan apakah sarana dan prasarana yang dimiliki negara telah dikelola dan digunakan secara tepat dan berhasil sesuai dengan peraturan dan pedoman pengendalian penggunaan dan pemanfaatan komoditas milik negara.
- 5) Mengkaji apakah Dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) telah digunakan secara efektif dan bijak, terutama dalam hal penyelenggaraan sarana dan prasarana pendidikan.
- 6) Sebagai data yang membantu dalam pembuatan rencana dan kebijakan untuk perluasan dan kemajuan di masa depan di bidang pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan infrastruktur dan fasilitas di masa depan.

c. Prinsip-prinsip Manajemen Prasaran dan Sarana

Donnie dan Rismi menyatakan bahwa pedoman berikut harus diikuti saat mengelola sarana dan prasarana:

- 1) Aksesibilitas sumber daya. Untuk mendukung sepenuhnya efektivitas proses pembelajaran, sekolah harus selalu memiliki infrastruktur dan sumber daya yang dibutuhkan.
- 2) Kemudahan sarana. Untuk memudahkan akses, infrastruktur dan fasilitas sekolah harus dibuat nyaman untuk digunakan.
- 3) Penerapan Alat. Infrastruktur dan fasilitas sekolah harus bekerja sama untuk menjamin lingkungan belajar yang tidak terhalang.
- 4) Harus ada infrastruktur dan fasilitas yang cukup di sekolah untuk menjamin pengalaman belajar yang lancar. Komponen penting dari prosedur sertifikasi sekolah adalah kelengkapan sarana dan prasarana.
- 5) persyaratan peserta. Sekolah harus memiliki infrastruktur dan fasilitas yang dapat menampung anak-anak dengan kebutuhan yang berbeda.
- 6) Ergonomi. Pendekatan ergonomis harus digunakan ketika merencanakan infrastruktur dan fasilitas sekolah untuk memastikan bahwa proses pembelajaran didukung sebaik mungkin dengan tetap menjaga kenyamanan.
- 7) Kehidupan pelayanan. Infrastruktur dan fasilitas di sekolah harus tahan lama dan tahan lama. Akibatnya, infrastruktur dan fasilitas sekolah harus memenuhi persyaratan keunggulan yang ketat.
- 8) Perawatan. Sarana dan prasarana di sekolah harus mudah dirawat agar tidak memakan banyak tenaga.

d. Area Manajemen Sarana dan Prasarana

Bafadal mendefinisikan ruang lingkup administrasi infrastruktur pendidikan sebagai (perencanaan), yang meliputi penilaian persyaratan infrastruktur dan sarana sekolah serta pengorganisasian perolehan infrastruktur tersebut. (Pengorganisasian) meliputi alokasi sarana dan prasarana sekolah serta konfigurasi tata ruang sarana dan prasarana. Menggunakan fasilitas dan infrastruktur sekolah secara efektif dan efisien, memeliharanya, menginventarisasinya, dan menghapus semua yang tidak lagi diperlukan semuanya termasuk dalam penerapan. Mengawasi seberapa baik bangunan dan infrastruktur sekolah digunakan dan dipelihara, serta mengevaluasi kinerja tugas-tugas tersebut, semuanya termasuk dalam (supervisi). (Wijayanto et al., 2021)

Selain itu, Werang menyatakan bahwa ruang lingkup pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan meliputi perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana, pembelian sarana dan prasarana, inventarisasi dan penyimpanan sarana dan prasarana, pemeliharaan sarana dan prasarana, pemindahan sarana dan prasarana, serta pengawasan sarana dan prasarana.

1) Perencanaan sarana dan prasarana sekolah

Perencanaan infrastruktur pendidikan, menurut Jones, merupakan penyelesaian pembuatan fasilitas pendidikan di sekolah. Langkah pertama dalam proses ini adalah menilai dan menganalisis jenis pengalaman pendidikan yang direncanakan sekolah untuk tahun sebelumnya. Keuntungan tersebut kemudian digunakan untuk mengambil tindakan.

2) Pembelian sarana dan prasarana

Proses perencanaan dan pembuatan program pengadaan sarana dan prasarana sekolah di kemudian hari untuk memenuhi tujuan pendidikan di sekolah dikenal dengan pengadaan sarana dan prasarana. Menurut Bafadal, sekolah itu sendiri harus bertanggung jawab langsung atas pembelian perlengkapan sekolah sebagai bagian dari inisiatif untuk meningkatkan standar pendidikan yang diberikan di sekolah atau sebagai bagian dari kerangka administrasi berbasis sekolah. baik melalui sumber keuangan internal sekolah maupun subsidi pemerintah. Oleh karena itu, model pembiayaan pemerintah harus dimodifikasi dalam rangka Pengelolaan Peningkatan Kualitas Berbasis Sekolah

(MPMBS) dari pendanaan langsung menjadi penyaluran uang tunai tidak langsung kepada kepala sekolah. Selain itu, kepala sekolah, fakultas, Selain itu, jika diperlukan, pejabat sekolah memiliki kewenangan untuk mengawasi perolehan perlengkapan sekolah secara mandiri sesuai dengan permintaan yang sebenarnya.

e. Pengukuran Perencanaan Prasarana dan Sarana

1) Analisis Kebutuhan

Menurut Kompri, proses perencanaannya meliputi kajian terhadap persyaratan sarana dan prasarana pendidikan, yang menitikberatkan pada persyaratan sarana dan prasarana pembelajaran. Dikembangkan dua indikator dari usulan Kompri: penilaian kebutuhan di dalam kelas dan penilaian kebutuhan di luarnya.

2) Analisis keuangan

Menurut Gunawan dan Benty, perkiraan biaya lembaga sekolah harus dipertimbangkan saat merencanakan sarana dan prasarana pendidikan. Menurut Gunawan dan Benty, terdapat dua indikator yaitu pemanfaatan dan penyelesaian sarana prasarana.

3) Analisis prioritas

Memprioritaskan infrastruktur dan sarana dalam perencanaan merupakan faktor krusial yang harus diperhitungkan sebelum pembelian selesai, menurut Gunawan dan Benty. Menurut apa yang dikatakan Gunawan dan Benny, pada dasarnya menciptakan satu indikator, utilitas.

f. Indikator untuk Pengadaan Prasarana dan Sarana

Menurut Bafadal, penyediaan fasilitas sekolah harus berada di bawah lingkup manajemen berbasis sekolah atau peningkatan kualitas pendidikan yang berkonsentrasi pada tingkat sekolah. Ini mungkin memerlukan sumber keuangan sekolah internal atau sumbangan dari pemerintah. Dukungan langsung pemerintah terhadap sekolah harus memberi jalan pada keuangan terpusat yang dijalankan oleh kepala sekolah guna menyediakan fasilitas dalam kerangka Manajemen Peningkatan Kualitas Berbasis Sekolah (MPMBS). Pembelian fasilitas sekolah yang diperlukan akan dilakukan secara efektif oleh kepala sekolah, guru, dan, jika diperlukan, pengurus panitia. Berdasarkan teori Bafadal, dikembangkan empat indikator, yaitu:

1) Adegan

Menurut Ihuoma, tujuan diadakannya sarana dan prasarana tersebut menjadi pertimbangan saat menentukannya. Dua indikator dikembangkan dari usulan Ihuoma, yaitu: tujuan prioritas.

2) Sumber pengadaan

Taylor mengatakan bahwa uang dapat berasal dari sektor publik dan swasta, yang memiliki hubungan langsung dengan lembaga pendidikan, dalam hal pembelian peralatan dan fasilitas pendidikan. Menurut Gunawan dan Benty, ada beberapa cara untuk mendapatkan sarana dan peralatan, seperti membelinya secara langsung, memproduksinya secara internal, mendapatkan hibah atau pinjaman dari perusahaan swasta, menyewakan, dan meminjam uang dari lembaga pendidikan. Empat indikator dikembangkan dari gagasan yang dikemukakan Gunawan dan Benty, yaitu: recycling, buying, lending, dan trading.

3) Kualitas infrastruktur dan fasilitas

Menurut Gunawan dan Benty, komponen akuntabilitas pembelian alat dan fasilitas pendidikan harus dijaga, artinya prosedur pengadaan harus mencapai semua tujuan, termasuk yang berkaitan dengan unsur fisik dan keuangan serta keunggulan yang mendukung pengalaman belajar yang lancar. Periode yang seharusnya digunakan merupakan indikator yang dikembangkan dari dikemukakan oleh Gunawan dan Benty.

Intinya, kata Oluwole, sarana dan prasarana pendidikan disediakan untuk memenuhi kebutuhan sekolah. Usulan Oluwole menghasilkan penciptaan satu indikator yang berguna.

b. Perencanaan Peralatan untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan di MAN 1

Mojokerto

a. Evaluasi Kebutuhan

Berdasarkan variabel terkait perencanaan yang digunakan peneliti, secara khusus perlu dilakukan analisis. Agar madrasah dapat meningkatkan taraf pendidikan, maka harus mampu menilai kebutuhan infrastruktur, baik yang ada di dalam kelas maupun di luarnya. Sekolah itu sendiri juga harus mampu menilai kebutuhan akan kedisiplinan, pembelajaran, dan guru.

Kepala sekolah, empat wakil kepala, dan satu rumah tangga semuanya bekerja sama untuk menyelesaikan analisis kebutuhan ini. Infrastruktur WAKA adalah komponen paling penting dari tugas ini. Di MA Negeri 1 Mojokerto, analisis kebutuhan menitikberatkan pada kebutuhan infrastruktur ruang kelas, antara lain media pengajaran, perlengkapan, dan perlengkapan ruang kelas, sedangkan bagian luar ruang kelas meliputi lapangan olah raga, parkir, toilet, dan fasilitas lainnya sesuai dengan standar pemerintah.

Agar infrastruktur MA Negeri 1 Mojokerto siap digunakan dari segi anggaran dan pengadaan pada awal tahun ajaran berikutnya, dilakukan analisis kebutuhan infrastruktur lembaga pada akhir tahun berjalan. Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Madrasah, kepala sekolah, wakilnya, dan guru menganalisis kebutuhan penggunaan data sebelum data teknis kepala sekolah untuk mengevaluasi infrastruktur secara keseluruhan, apakah kelebihan atau kekurangannya. Kemudian, kepala sekolah dan wakil guru memutuskan infrastruktur apa yang dibutuhkan.

Peneliti menemukan bahwa terdapat dua indikator MA Negeri 1 Mojokerto dalam analisis persyaratan, yaitu:

1) Persyaratan di luar kelas

Perencanaan dengan indikasi keberhasilan dalam menilai kebutuhan di luar kelas telah berhasil dilaksanakan oleh MA Negeri 1 Mojokerto. Dalam bukunya tahun 2009 Sulistyorini, berjudul Konsep, Strategi, dan Penerapan Manajemen Pendidikan Islam, J. Jones menguraikan bagaimana desain fasilitas pendidikan di sekolah dimulai dengan menilai dan menganalisis jenis pengalaman pendidikan yang ditawarkan sekolah pada tahun sebelumnya. Aksi MA Negeri 1 Mojokerto mendukung dan memvalidasi teori ini.

2) persyaratan di dalam kelas

Senada, analisis Ma Negeri 1 Mojokerto terhadap tuntutan di kelas telah mampu mengimplementasikan perencanaan dengan indikator keberhasilan. Tesis J. Jones dalam buku Sulistyorini tahun 2009, Konsep, Strategi, dan Penerapan Manajemen Pendidikan Islam, diperkuat dengan aksi MA Negeri 1 Mojokerto.

b. Analisis Keuangan

Menurut indikator perencanaan-khususnya analisis keuangan-yang dikemukakan oleh peneliti. Kemampuan untuk mengevaluasi pendanaan atau anggaran untuk infrastruktur selama satu tahun merupakan prasyarat bagi madrasah. Dengan menggunakan indikator ini, MA Negeri 1 Mojokerto mengkaji pendanaan sesuai dengan kebutuhan madrasah. Penggunaan uang lancar dan penyelesaian infrastruktur yang diperlukan menjadi topik utama analisis keuangan Madrasah Aliyah 1 Mojokerto ini.

APBN menyediakan dana untuk infrastruktur MA Negeri 1 Mojokerto melalui hibah, dana BOS, Bopp provinsi daerah, dan dukungan masyarakat melalui panitia madrasah. penggunaan penelitian ini berbarengan dengan analisis kebutuhan yang dilakukan oleh

kepala sekolah dan wakil kepala sekolah Waka Sarana Prasarana. Guru dan perwakilan lainnya mendukung perwakilan infrastruktur dan kepala sekolah dalam kegiatan ini.

Data sebelumnya yang dikumpulkan selama proses evaluasi diperlukan untuk analisis tuntutan MA Negeri 1 Mojokerto guna menghitung pendanaan untuk tahun anggaran mendatang. Informasi tersebut berupa usulan anggaran yang dilakukan selama tahun anggaran sebelumnya.

Peneliti menemukan bahwa terdapat dua indikator dalam studi keuangan MA Negeri 1 Mojokerto, yaitu:

1) Penggunaan

Dalam bukunya tahun 2009 Sulistyorini, berjudul *Konsep, Strategi, dan Penerapan Manajemen Pendidikan Islam*, J. Jones menguraikan bagaimana desain fasilitas pendidikan di sekolah dimulai dengan menilai dan menganalisis jenis pengalaman pendidikan yang ditawarkan sekolah pada tahun sebelumnya. Temuan dari para peneliti di lapangan ini mendukung teori Jones. Hipotesis yang dikemukakan Djum Djum Noor Bendy dan Imam Gunawan dalam bukunya *Manajemen Pendidikan* tahun 2021 mendukung kesimpulan para peneliti dalam pemeriksaan pendanaan. Pengantar dan praktik yang menyatakan bahwa perkiraan biaya yang tersedia di lembaga sekolah harus dipertimbangkan saat merencanakan sarana prasarana pendidikan. Penggunaan uang saat ini dan penyelesaian infrastruktur sejalan dengan dana yang ada adalah dua indikator yang dicari peneliti dalam gagasan ini. MA Negeri 1 Mojokerto berhasil menyelesaikan sarana prasarana untuk meningkatkan taraf pendidikan dengan menggunakan dana pemerintah dan sumbangan masyarakat.

2) Kepuasan

MA Negeri 1 Mojokerto telah mampu memenuhi infrastruktur sebagaimana dimaksud, yang sebanding dengan indikasi pemenuhannya. Indikator yang ditemukan peneliti di bidang ini mendukung teori J. Jones dalam buku Sulistyorini tahun 2009

a. Analisis Tujuan

Berdasarkan analisis prioritas, salah satu indikator perencanaan yang digunakan akademisi. MA Negeri 1 Mojokerto mampu menganalisis prioritas infrastruktur yang perlu ditetapkan dan diikuti. MA Negeri 1 Mojokerto menetapkan sarana prasarana yang diprioritaskan dalam indikator ini. Berdasarkan kegunaan yang akan dimanfaatkan, MA Negeri 1 Mojokerto melakukan analisis prioritas ini.

Tim penjaminan mutu merupakan salah satu organisasi atau tim yang termasuk dalam analisis prioritas kurikulum Waka ini. Salah satu tanggung jawab tim penjaminan mutu adalah menginvestigasi sarana prasarana terkait yang perlu dibangun guna menjaga dan meningkatkan kualitas pendidikan madrasah. Seluruh komponen madrasah masuk dalam pemeriksaan prioritas kepala sekolah dan waka sarana untuk mengetahui prioritas yang tepat sasaran.

Untuk memastikan infrastruktur siap digunakan pada awal tahun ajaran, analisis prioritas ini dilaksanakan pada akhir setiap tahun ajaran bersamaan dengan analisis kebutuhan dan keuangan.

Peneliti menemukan bahwa usability merupakan salah satu indikator dalam studi prioritas keadaan MA 1 Mojokerto. Temuan para peneliti mendukung teori J. Jones dalam bukunya *Islamic Education Management Concepts, Strategies, and Applications* tahun 2009, yang menjelaskan bahwa langkah pertama dalam merancang fasilitas pendidikan di sekolah adalah menilai dan menganalisis jenis pengalaman pendidikan yang direncanakan sekolah pada tahun sebelumnya. Tiga indikator-analisis kebutuhan, analisis pembiayaan, dan analisis prioritas-ditulis oleh para peneliti dalam hipotesis Jones. Berdasarkan gagasan tersebut, MA Negeri 1 Mojokerto mampu melakukan analisis prioritas.

Hasil analisis keuangan peneliti sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Imam Gunawan dan Djum Djum Noor Benty dalam bukunya tahun 2021, *Educational Management*. Menetapkan prioritas infrastruktur dan sarana dalam perencanaan merupakan langkah krusial yang harus diperhatikan sebelum diimplementasikan, menurut pengantar dan praktiknya. MA Negeri 1 Mojokerto mampu mengutamakan infrastruktur yang berfokus pada kegunaan.

c. Pengadaan Alat dan Peralatan untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran di MAN 1 Mojokerto

a. Penetapan

Menurut metrik-khususnya determinasi-yang digunakan para peneliti saat membeli infrastruktur untuk meningkatkan taraf pendidikan di negara bagian MA 1 Mojokerto. MA Negeri 1 Mojokerto mampu menyiapkan sarana prasarana dan menjalankan semua prosedur terkait. Prasarana MA Negeri 1 Mojokerto ditentukan oleh prioritas dan tujuan madrasah yang selaras dengan yang tertuang dalam rencana strategis (RENSTRA) yang telah ditetapkan oleh pimpinan madrasah.

Agar prosedur dan pembelian siap untuk awal tahun ajaran berikutnya, prinsip, dalam kapasitasnya sebagai pemimpin, menetapkan infrastruktur untuk satu tahun anggaran pada rapat akhir tahun.

Hasilnya menguatkan Dalam bukunya *School materials Management* tahun 2003, Dr. Ibrahim Bafadal menyatakan bahwa sekolah harus membeli bahan sekolahnya sendiri untuk meningkatkan standar pengajaran. Penentuan, sumber pengadaan, dan kualitas infrastruktur menjadi penanda yang digunakan peneliti dalam teori ini. MA Negeri 1 Mojokerto berhasil menyiapkan infrastruktur yang diperlukan untuk meningkatkan standar pengajaran yang mengedepankan tujuan dan prioritas.

Kesimpulan para peneliti konsisten dengan kesimpulan Dr. (Ibu) Ihouma P. Asiabaka, yang menyatakan dalam artikel jurnalnya berjudul *Perlunya Manajemen Fasilitas yang Efektif di Sekolah-sekolah di Nigeria* bahwa tujuan penyelenggaraan fasilitas infrastruktur harus dipertimbangkan saat menentukannya. MA Negeri 1 Mojokerto mampu menciptakan infrastruktur yang mengedepankan dan menitikberatkan pada tujuan infrastruktur.

b. Sumber Pengadaan

MA Negeri 1 Mojokerto menjadi sumber pembeliannya, sesuai dengan faktor-faktor yang dicari peneliti saat memperoleh infrastruktur untuk meningkatkan taraf pendidikan. Peneliti menemukan dua sumber pengadaan, yaitu

1) Beli

Metode dan tindakan yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana menjadi sumber pengadaan di madrasah ini a. Mayoritas sarana prasarana di MA Negeri 1 Mojokerto dimiliki melalui pembelian peralatan.

2) pemeliharaan

Untuk memelihara dan memperbaiki infrastruktur, MA Negeri 1 Mojokerto mempekerjakan tenaga profesional di bidangnya, seperti perbaikan AC. Saat AC tidak bekerja dengan baik, MA Negeri 1 Mojokerto memanggil tenaga profesional untuk memperbaiki dan merawatnya. Pembelian real estate, seperti gedung MA Negeri 1 Mojokerto, melibatkan pembayaran kontraktor untuk membangun bangunan tersebut, termasuk MA Negeri 1 Mojokerto pada tahun 2023, untuk mengembangkan pengembangan keterampilan. Salah satu tindakan MA Negeri 1 Mojokerto adalah menyewa kontraktor yang mumpuni untuk membangun bangunan tersebut.

Prinsipnya tetap mencermati pelaksanaan pengadaan yang ditangani langsung oleh WAKA Sarana Prasarana.

Hasilnya menguatkan buku Dr. Ibrahim Bafadal tahun 2003, *School materials Management*, yang mengatakan bahwa sekolah harus membeli bahan sekolahnya sendiri untuk meningkatkan standar pengajaran. Penentuan, sumber pengadaan, dan kualitas infrastruktur menjadi penanda yang digunakan peneliti dalam teori ini. Dengan membeli, melestarikan, dan merestorasi infrastruktur, MA Negeri 1 Mojokerto mampu meningkatkan taraf pendidikan.

Menurut riset pengadaan infrastruktur, seperti yang dilaporkan Gunawan dan Benty dalam buku *Manajemen Pendidikan* edisi 2017, sumber pengadaan infrastruktur antara lain pembelian, pembangunan, penyewaan, peminjaman, dan perolehan hibah atau pinjaman dari swasta. MA Negeri 1 Mojokerto telah berhasil mengakuisisi, memperbaiki, dan memelihara infrastruktur.

c. Kualitas Peralatan

Menurut temuan peneliti, kualitas menjadi penentu utama pembelian infrastruktur dalam meningkatkan taraf pendidikan di MA Negeri 1 Mojokerto. Infrastruktur MA Negeri 1 Mojokerto memiliki kualitas yang sangat baik; ukuran infrastruktur dalam hal ini ditentukan oleh kegunaannya dan tujuannya.

Guru dan siswa bekerja sama untuk menilai infrastruktur kadasar yang terdiri dari empat kepala sekolah waka dan satu rumah tangga. Fasilitas infrastruktur disurvei setiap hari oleh Madrasah WAKA Sarana Prasarana untuk memastikan semuanya dalam kondisi baik dan beroperasi dengan sebaik-baiknya.

Setiap sarana prasarana madrasah yang ada saat ini telah distandarisasi baik untuk komoditas tidak bergerak maupun bergerak. Kementerian Pendidikan Agama mengembangkan dan mengawasi standar tersebut.

Dalam bukunya tahun 2003 *School Supplies Management*, peneliti seperti Dr. Ibrahim Bafadal menyatakan bahwa sekolah harus membeli perlengkapan sekolahnya sendiri untuk meningkatkan standar pengajaran. Penentuan, sumber pengadaan, dan kualitas infrastruktur menjadi penanda yang digunakan peneliti dalam teori ini. Dengan berkonsentrasi pada prioritas dan tujuan, MA Negeri 1 Mojokerto mampu mempertahankan infrastruktur berkualitas tinggi untuk meningkatkan taraf pendidikan.

Hasil kajian kualitas infrastruktur mendukung klaim Gunawan dan Benty (2017) dalam bukunya *Manajemen Pendidikan* bahwa perolehan infrastruktur pendidikan harus akuntabel, artinya harus memenuhi tujuan keuangan, jasmani, dan penunjang pembelajaran. MA Negeri 1 Mojokerto mampu menjaga infrastruktur sesuai dengan targetnya, yang berdampak pada standar keberhasilan pembelajaran.

SIMPULAN

Temuan penelitian menunjukkan bahwa MA Negeri 1 Mojokerto berhasil dalam perencanaan infrastruktur berdasarkan indikator-indikator yang dikembangkan oleh peneliti, khususnya kebutuhan, pembiayaan, dan prioritas dari ketiga indikator tersebut. Hal ini menjadi rencana strategis MA Negeri 1 Mojokerto untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dalam pembangunan fasilitas untuk meningkatkan standar pendidikan Sesuai dengan standar dan rencana strategis yang telah ditetapkan, MA Negeri 1 Mojokerto telah menetapkan pengadaan infrastruktur melalui pemeliharaan, pembelian, dan pemeliharaan. Sarana prasarana yang dibeli untuk meningkatkan kualitas Ma Negeri 1 Mojokerto sejalan dengan kualitas, sumber, dan indikator yang dikembangkan oleh para peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, B. B. (2012). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur. *Skripsi Akuntansi*, 1–17.
- Ghozali, A., K., M. A., & Hayati, M. (2013). Studi Pendanaan Pendidikan Madrasah di Indonesia.

- Education Sector Analytical and Capacity Development Partnership*, 1–80. www.acdp-indonesia.org
- Hasbi, I., Fuadi, A., Nadeak, B., Arifudin, O., Juliastuti, Lestari, A. S., Utomo, W. T., Rianita, N. M., Fatmasari, R., Pasaribu, E., Darmawan, I. P. A., Sopwan, I. D., & Arafah, N. (2021). Administrasi Pendidikan Tinjauan Konsep dan Praktik. In *Penerbit Widina Bhakti Persada*.
- Hewi, L., & Shaleh, M. (2020). Refleksi Hasil PISA (The Programme For International Student Assesment): Upaya Perbaikan Bertumpu Pada Pendidikan Anak Usia Dini. *Jurnal Golden Age*, 4(01), 30–41. <https://doi.org/10.29408/jga.v4i01.2018>
- Juita, G., Jahera, J., Zulkifli, A., & Ananda, R. (2024). Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar Dalam Meningkatkan Proses Pembelajaran Yang Efektif. *Elementary School*, 11, 572–582.
- Nicomse, N., & Naibaho, T. (2022). PENGUATAN LITERASI DAN NUMERASI UNTUK MENDUKUNG PROFIL PELAJAR PANCASILA SEBAGAI INOVASI PEMBELAJARAN MATEMATIKA. *Sepren*. <https://doi.org/10.36655/sepren.v4i0.841>
- Norlena, I. (2015). Sekolah Sebagai Organisasi Formal (Hubungan Antar Struktur). *Tarbiyah Islamiyah*, 5(2), 43–55.
- Pendidikan, A., Universitas, P., & Kuala, S. (2017). *Kompetensi Profesional Guru Dalam Pengelolaan*. 88–95.
- Setiabudi Sukma, H., Iskandar, & Pahrudin, A. (2024). Manajemen Mutu Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Menengah di Sekolah dan Madrasah. *JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL*, 5(3), 242–252. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v5i3.1925>
- Sumual, S. D. M., Tuerah, P. R., Pontoh, L. F., Taroreh, O., Repi, F., & Mesra, R. (2023). Implikasi Terbatasnya Infrastruktur Dalam Upaya Mencapai Tujuan Pendidikan. *JUPE : Jurnal Pendidikan Mandala*, 8(2), 418. <https://doi.org/10.58258/jupe.v8i2.5261>
- Ummah, M. S. (2019). MANAJEMEN LIFE SKILLPADA SEKOLAH UNGGUL MELALUI TEORI FISHBONE. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Wijayanto, K., Mudofir, M., & Makruf, I. (2021). Transformasi Manajemen Infrastruktur Pendidikan Dalam Era Disrupsi Teknologi di IAIN Surakarta. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 829–839. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2684>